

## BAB IX

## PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Setelah target capaian indikator pembangunan berikut pagu anggaran telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka agar proses pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah Kota Malang memiliki dasar hukum yang kuat, perlu ditetapkan indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah ini merupakan bagian integral dari dokumen RPJMD Kota Malang 2013 – 2018. Oleh karenanya kekuatan hukum atas indikator dan capaian target kinerja adalah setara dengan kekuatan hukum dari dokumen RPJMD ini sendiri.

Adapun penetapan indikator kinerja daerah ditujukan guna memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja dalam aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini akan ditunjukkan dari besarnya akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahunnya, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD akan dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan cara mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau yang merupakan komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator

capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Kota Malang periode 2013-2018 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian pembangunan Kota Malang membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan yang telah dicapai. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Data dan informasi mengenai indikator kinerja daerah tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan yang diperlukan, menentukan alokasi anggaran prioritas, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah-masalah yang sedang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan daerah, membuat tindakan-tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan daerah yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

Penetapan indikator kinerja daerah Kota Malang dibagi menjadi dua kelompok, yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah.

---

## **IX. 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama akan mencerminkan indikator makro rencana capaian kinerja bidang sosial ekonomi masyarakat. Dalam tabel berikut ini akan disajikan mengenai Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD Kota Malang 2013 – 2018.

Tabel 9.1  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Malang 2013 – 2018

1	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>								
<b>Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>								
1.1.	Pertumbuhan PDRB	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13
1.2.	Pertumbuhan Ekonomi	7,30	7,30	7,40	7,50	7,60	7,70	7,70
1.3.	Laju Inflasi	7,92	7,80	5,50	4,75	4,50	4	4
1.4.	IPM	78,78	78,98	79,1 8	79,3 8	79,5 8	79,7 8	79,78
1.5.	Kemiskinan	4,48	4,65	4,45	4,25	4,05	3,89	3,89
1.6.	Pengangguran Terbuka	7,72	7,66	7,55	7,45	7,35	7,25	7,25

## **IX. 2. INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Indikator Kinerja daerah akan menggambarkan rencana capaian indikator kinerja masing-masing urusan pemerintahan di dalam masing-masing Misi Pembangunan Kota Malang 2013 – 2018, termasuk didalamnya program-program pembangunan prioritas.

Dalam tabel berikut ini akan disajikan mengenai Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kota Malang 2013 – 2018.

Tabel 9.2  
Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

MISI 1 : Menciptakan Masyarakat yang Makmur, Berbudaya dan Terdidik Berdasarkan Nilai-Nilai Spiritual yang Agamis, Toleran dan Setara												
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KEGIATAN DAERAH (SESUAI PERMEND AGRI 13/2006)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014	2015	2016	2017					
Meningkatnya pemerataan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terklasifikasi:	38.158	38158	34345	30526	26710	22800	19079	1. Pembinaan PMKS	1. Pembinaan anak terlantar	SOSIAL	DINAS SOSIAL

	a) ODHA	350	345	340	335	330	325	325		2. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma		
	b) Korban NAPZA	51	46	41	36	31	25	25		3. Pembinaan panti asuhan/ panti jompo		
	c) Pengemis	184	184	175	166	158	150	150				
	d) Gelandangan	56	56	53	51	48	46	46				
	e) Tunasusila	35	35	33	32	30	29	29				
	f) Anak Jalanan	227	227	216	205	195	185	185				
	g) Lanjut Usia Terlantar	174	174	165	157	149	142	142				
	h) Fakir Miskin	36286	36286	34472	32748	31111	29555	29555				

	2. Jumlah relawan sosial terlatih pendamping PMKS	27%	27%	40%	67%	83%	90%	90%				
	3. Persentase (%) PMKS skala Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	1,77%	2,84%	7,30%	13,53%	15,97%	18,19%	18,19				



	4. Persentase (%) PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	56,30%	56,89%	62,00 %	62,10%	62,50%	62,70%	65,00 %				
	5. persentase (%) panti sosial skala Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

	6. persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	7. persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	10%	17%	-	42%	58%	84%	100%	2. Peningkatan fasilitas penanganan PMKS	1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	SOSIAL	DINAS SOSIAL

										2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
	8. persentase (%) korban bencana skala Kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3. Peningkatan kerjasama guna pembinaan PMKS 1. pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	SOSIAL	DINAS SOSIAL

<p>9. persentase (%) korban bencana skala Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>			<p>SOSIAL</p>	
<p>10. Prosentase ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pada panti sosial (panti asuhan, panti jompo, panti rehab cacat, dll)</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>			<p>SOSIAL</p>	

	11. Jumlah lembaga yang membantu pelaksanaan kesejahteraan sosial	92%	94%	94%	94%	94%	94%	94%				
	1. Prosentase (%) penurunan angka kemiskinan	5,20%	1,92 % (Prosentase penurunan), (Angka kemiskinan 5,10%)	5,00%	5,00%	4,80%	4,70%	4,70%	1. Optimalisasi bantuan program bagi warga miskin	Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	SOSIAL	BKBPM
	2. Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan	57 kel	57 kel	57 kel	57 kel	57 kel	57 kel	57 kel	2. Peningkatan pelatihan ketrampilan untuk pemberdayaan masyarakat miskin	Pemberdayaan masyarakat miskin	SOSIAL	BKBPM, KELURAHAN

	3. Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat miskin yang mendapat bantuan sarana dan prasarana usaha	15 kel	15 kel	15 kel	15 kel	15 kel	15 kel	15 kel	3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	BKBPM, KECAMATAN, KELURAHAN
	4. Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam memperoleh modal usaha	5 program	5 program	5 program	5 program	5 program	5 program	5 program		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan		
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	1. Ratio Tempat ibadah per satuan penduduk	3 : 1.000	3 : 1.000	3 : 1.000	3 : 1.000	3 : 1.000	3 : 1.000	3 : 1.000	Fasilitasi kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan (Islamic Center)	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	SOSIAL	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - SETDA

	2. Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan	20/1786	76/1786	75/1786	75/1786	75/1786	75/1786	75/1786				
	3. Cakupan modin penerima tunjangan	980/980	1088/1088	1088/1088	1088/1088	1088/1088	1088/1088	1088/1088				
	4. Cakupan pendidik keagamaan penerima tunjangan	6400/6252	6252/6252	6750/6750	6750/6750	6750/6750	6750/6750	6750/6750				
	5. Cakupan peningkatan kapasitas bagi pendidik keagamaan	0/6252	350/6252	500/6750	500/6750	500/6750	500/6750	500/6750	2. Peningkatan kegiatan-kegiatan bersama antar umat beragama			

	6. Jumlah kegiatan dialog dan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lintas agama dan keyakinan	5	5	5	5	5	5	5	3. Pembinaan organisasi/ kelompok keagamaan			
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--



Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban dan ketenteraman masyarakat	1. Persentase keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif	26,67%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	Peningkatan pendidikan politik kewarganegaraan	1. Pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	2. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		2. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		

	3. Persentase partisipasi pemilih dalam Pilpres	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		3. Pendidikan politik masyarakat		
	4. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilukada	62%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	1. Persentase penanganan konflik/kekerasan berbasis SARA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Peningkatan sarana dan prasarana keamanan lingkungan	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	2. Rasio Poskamling per jumlah 100 KK	0,49	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53	0,53	2. Koordinasi dan kerjasama keamanan lingkungan dengan aparat terkait	1. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	3. Prosentase keaktifan RW dalam mengadakan siskamling	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		2. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		
	4. Rasio Petugas Linmas (1 RT 1 Linmas pada 2014)	0,63	1	1,25	1,5	1,75	2	2		3. Pemeliharaan kantrantib-mas dan pencegahan tindak kriminal		
	5. Rasio Polisi Pamong Praja per 10,000 penduduk	1,644	1,655	2,01	2,365	2,72	2,968	2,968				

	6. Persentase konflik yang termediasi (konflik/perkelahian antar kelompok pemuda, pelajar/mahasiswa, antar kampung)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3. Penyelesaian konflik horisontal secara dini, tepat, dan menyeluruh	Pencegahan Dini konflik horisontal	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KELURAHAN
	7. Persentase organisasi antisipasi/siaga bencana yang memiliki SDM terlatih dan perlengkapan standar penanganan bencana	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	4. Peningkatan kesiagaan terhadap bencana	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8. Prosentase keaktifan koordinasi Muspika (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				KECAMATAN	
	1. Jumlah organisasi perempuan	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	1. Peningkatan peran keluarga sebagai kelompok sosial terkecil	1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BKBPM
	2. Persentase kegiatan organisasi perempuan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		2. Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		

	3. Persentase organisasi/ kelompok yang mengembangkan pembinaan keluarga	100% (29 organisasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan-an dan Anak	1. Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan fungsi keluarga yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	1. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan-an	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BKBPM
	2. Jumlah lembaga perlindungan anak	1	1	5	5	5	5	5		2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		

	3. Persentase terselenggaranya kegiatan/forum anak yang difasilitasi	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%				
	4. Persentase penanganan kasus tindakan KDRT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	5. Persentase penanganan kasus tindakan asusila	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

	6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
--	--	------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--



	<p>6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.</p>	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
--	---	----	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--

	7. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
--	---	----	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--

	8. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%				
	9. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

	10. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
<b>MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur dan Akuntabel</b>												
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KEGIATAN DAERAH (SESUAI PERMEND AGRI 13/2006)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014	2015	2016	2017					

Meningkatnya kualitas layanan publik kepada masyarakat	1. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah daerah	-	4 simda	6 simda	8 simda	9 simda	10 simda	10 simda	1. Efektivitas dan efisiensi pengolahan data dalam sistem manajemen informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media massa seperti majalah, radio, dan televisi 12 kali/tahun	12	11	12	12	12	12	12	2. Perluasan akses publik terhadap informasi publik (berbasis TIK)	1. Pengembangan Implementasi e-Government		

	3. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media baru seperti website (media online) setiap hari	365	365	365	365	365	365	365		2. Pengembangan Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi		
	4. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media tradisional seperti pertunjukan rakyat 12 kali/tahun	12	12	12	12	12	12	12		3. peningkatan kualitas pelayanan informasi		

	<p>5. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi, dan lokakarya 12 kali/tahun setiap kecamatan</p>	12	12	12	12	12	12	12		<p>4. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</p>		
--	--	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--

	6. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho 12 kali/tahun	12 kali 4.000 lbr	12 kali 4.000 lbr	12 kali 4.000 lbr	12 kali 4.000 lbr	12 kali 4.000 lbr	12 kali 4.000 lbr	12 kali 4.000 lbr		5. pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi		
	7. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Tingkat kecamatan	180% (9 KIM 5 Kec.)	100% (5 Kecamatan)	100% (5 Kecamatan)	100% (5 Kecamatan)	100% (5 Kecamatan)	100% (5 Kecamatan)	100% (5 Kecamatan)		6. fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		
										7. Kerjasama informasi dan media massa		



	8. Cakupan pengguna informasi publik yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	9. Persentase informasi publik yang bisa diakses publik melalui website pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Adanya sistem pengelolaan data dan arsip daerah yang bisa diakses oleh masyarakat	-	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	1. Pengembangan sistem dan informasi data base daerah	1. perbaikan sistem administrasi kearsipan	KEARSIPAN	KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH
										2. penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		
										3. pemeliharaan rutin/berkala sarana dan		

										prasarana kearsipan		
										2. Pengembangan sistem informasi perencanaan daerah		
	1. Adanya SOP pelayanan informasi publik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1. Peningkatan fasilitas pelayanan publik	1. Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	SELURUH SKPD

	3. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada		2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
	5. Terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		3. Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu		
	5. Prosentase meningkatnya jumlah Izin Terbit IMB	11,90%	14%	16%	18%	20%	22%	22%		4. Pelayanan Administrasi Perkantoran		

	6. Lamanya proses penerbitan izin IMB, IG, Trayek dan IUJK									5. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
	IMB yang diproses di BP2T	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	6. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah		
	IMB yang membutuhkan rekom DPU-PPB	8 Hari	8 Hari	8 Hari	8 Hari	8 Hari	8 Hari	8 Hari	8 Hari			
	IG	9 Hari	9 Hari	9 Hari	9 Hari	9 Hari	9 Hari	9 Hari	9 Hari	7. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		
	Trayek	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	8. Penataan Otonomi Daerah		
	IUJK :									9. Kerjasama Pembangunan		
	- baru	8 Hari	8 Hari	8 Hari	8 Hari	8 Hari	8 Hari	8 Hari	8 Hari			
	- her regist	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari			
	- perpanjang	8 Hari	8 Hari	8 Hari	8 Hari	8 Hari	8 Hari	8 Hari	8 Hari			
	- hilang	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari			

7. Prosentase kasus tumpang tindih fungsi dan tugas yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		10. Pengembangan Wilayah Perbatasan		
8. Prosentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	2% (2 SOP)	20%	40%	60%	80%	100%	100%					
9. Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
10. Persentase pelaksanaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%						

	11. Prosentase pengaduan yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		2. Optimalisasi saluran pengaduan layanan publik melalui berbagai media disertai dengan penanganan yang cepat dan tepat	Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	SELURUH SKPD
	1. Cakupan penerbitan Kartu tanda Penduduk (KTP)	90,89%	92%	94%	95%	96,31%	97,49%	97,49%	Peningkatan layanan administrasi Kependudukan	Penataan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	82%	88%	90%	92%	93,90%	96,80%	96,80%				
	3. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	91,70%	95%	100%	100%	100%	100%	100%				

	4. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	10%	30%	70%	75%	80%	85%	85%				
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	1. Adanya hasil pemetaan mengenai potensi peningkatan pendapatan daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	3. Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	1. peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	SELURUH SKPD
	2. Adanya proyeksi peningkatan pendapatan daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada		2. peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah		

	3. Prosentase peningkatan pajak daerah	49,90%	19%	15%	15%	15%	15%	79%		3. peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
	4. Hasil audit LKD oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		4. Pelayanan Administrasi Pembangunan		
	5. Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		5. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah		



Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik	Adanya sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	1. Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	INSPEKTOR AT
											2. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		
											3. Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan		

										prosedur pengawasa n			
	1. Adanya mekanisme rekrutmen jabatan yang akuntabel	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	2. Pengembangan sistem rekrutmen jabatan yang bersih dari KKN	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	BKD
	Persentase jumlah aparatur yang naik pangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Jumlah aparatur pensiun dan MPP	361	369	350	371	393	416	1899					

	1. Jumlah Aparatur yang mengikuti Ujian Dinas	85	85	155	155	190	150	KPPI dan Ujian Dinas : 550 org	1. Pengembangan sistem pelatihan guna peningkatan kapasitas pengetahuan, nilai, dan ketrampilan aparatur	1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	SELURUH SKPD
	2. Persentase peningkatan ketrampilan dan profesionalisme aparatur	0,70%	0,89%	1,60%	1,60%	1,99%	1,60%	8%		2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur & Pemerintahan		
	3. Persentase Aparatur yang sedang tugas belajar	0,30%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,50%		3. Pendidikan Kedinasan		
	4. Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat MOT	0	1	1	0	0	0	2				

5. Persentase Aparatur yang mengikuti ADUM/diklatpim tingkat IV	47,50%	51%	59%	66%	72%	79%	79%				
6. Persentase Aparatur yang mengikuti SPAMA/diklatpim tingkat III	82%	82%	100%	100%	100%	100%	100%				
7. Persentase Aparatur yang mengikuti SPAMEN/diklatpim tingkat II	67%	70%	88%	97%	100%	100%					
8. Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan I	0%	8%	26%	40%	53%	100%	100%				
9. Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan II	0%	1%	27%	53%	74%	100%	100%				

10. Persentase Aparatur yang mengikuti diklat prajabatan golongan III	0%	0%	41%	68%	90%	100%	100%				
11. Persentase Aparatur yang mengikuti diklat administrasi pemerintahan Kelurahan	0%	0%	50%	0%	50%	0%	100%				
12. Persentase Aparatur yang mengikuti diklat manajemen pengelola barang dan Asset	79%	0%	100%	100%	100%	100%	100%				
13. Persentase Aparatur yang mengikuti diklat penatausahaan keuangan daerah	40%	60%	80%	80%	100%	100%	100%				

	16. Persentase aparaturnya Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	6,30%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%				
	2. Persentase pejabat yang mengisi dan menyerahkan LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2. Optimalisasi pelaksanaan tunjangan pegawai yang berasaskan keadilan	1. Peningkatan disiplin aparaturnya	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	BKD, DKP, DISHUB, SATPOL PP, BAG. UMUM
											2. Fasilitas pindah/purna tugas PNS		BKD

Meningkatnya kualitas dan legitimasi peraturan daerah	1. Persentase perda yang melibatkan partisipasi masyarakat daerah	100%	100 % (18 Perda)	100 % (18 Perda)	100 % (28 Perda)	100 % (38 Perda)	100 % (48 Perda)	100 % (48 Perda)	100 % (48 Perda)	1. Peningkatan kapasitas anggota DPRD	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	SEKRETARIAT DPRD
	2. Jumlah Perda Inisiatif masyarakat	10 Perda	10 Perda	20 Perda	30 Perda	40 Perda	40 Perda	50 Perda					
	3. Cakupan anggota DPRD yang telah mengikuti program peningkatan kapasitas SDM	100% (45 org dari 45 org anggota DPRD)	100% (45 org dari 45 org anggota DPRD)	100% (45 org dari 45 org anggota DPRD)	100% (45 org dari 45 org anggota DPRD)	100% (45 org dari 45 org anggota DPRD)	100% (45 org dari 45 org anggota DPRD)	100% (45 org dari 45 org anggota DPRD)	100% (45 org dari 45 org anggota DPRD)	1. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pembuatan, dan evaluasi peraturan daerah			

	Persentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, penyusunan dan evaluasi perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2. Penataan dan Penegakan Peraturan Daerah	1. Penerapan dan Penegakan Hukum	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	SELURUH SKPD
	Cakupan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		2. Penataan Peraturan Perundang-undangan		
	Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1,2	1,2	1,8	1,8	2,4	2,4	2,4				



Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	1. Jumlah hasil penelitian perencanaan pembangunan ekonomi	3 penelitian	5 penelitian	1 penelitian	1 penelitian	3 penelitian	2 penelitian	12 penelitian	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian, pengembangan, dan statistik dalam perencanaan daerah	1. Pengembangan data/informasi	STATISTIK	BAPPEDA
	2. Jumlah hasil penelitian perencanaan pengembangan kota	4 penelitian	2 penelitian	0	2 penelitian	1 penelitian	1 penelitian	6 penelitian		2. Pengembangan data/informasi/statistik daerah		
	3. Jumlah penelitian perencanaan sosial budaya	4 penelitian	2	0 penelitian	1 penelitian	1	1 penelitian	3 penelitian	1. Peningkatan sosialisasi pembuatan perencanaan daerah			
									2. Peningkatan sosialisasi hasil perencanaan daerah			

	4. Jumlah publikasi hasil musrenbang kelurahan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3. Peningkatan kualitas musrenbang sebagai media serap aspirasi pembangunan daerah	1. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	BAPPEDA & SELURUH SKPD
	5. Jumlah publikasi hasil musrenbang kecamatan	5	5	5	5	5	5	5	5		2. Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar		
	6. Prosentase tingkat kehadiran peserta Musrenbang	100% (150 orang)	100% (150 orang)	100% (150 orang)	100% (150 orang)	100% (150 orang)	100% (150 orang)	100% (150 orang)	100% (150 orang)		3. peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah		

7. Jumlah Musrenbangcam yang memiliki tingkat kehadiran di atas 80%	5	5	5	5	5	5	5	5	4. perencanaan pembangunan daerah		
8. Jumlah Musrenbangkel yang memiliki tingkat kehadiran di atas 80%	57	57	57	57	57	57	57	57	5. perencanaan pembangunan ekonomi		
9. Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan musrenbang kota	30% (50 orang)	30% (50 orang)	30% (50 orang)	30% (50 orang)	30% (50 orang)	30% (50 orang)	30% (50 orang)	30% (50 orang)	6. perencanaan sosial budaya		
10. Jumlah Musrenbangcam yang memiliki tingkat partisipasi perempuan minimal 30%	5	5	5	5	5	5	5	5	7. perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam		

	11. Jumlah Musrenbangkel yang memiliki tingkat partisipasi perempuan minimal 30%	57	57	57	57	57	57	57		8. perencanaan pembangunan daerah rawan bencana		
<b>MISI 3 : Mengembangkan potensi daerah dengan wawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil dan ekonomis.</b>												
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KEGIATAN DAERAH (SESUAI PERMEND AGRI 13/2006)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan perusahaan lingkungan hidup	1. Jumlah Perda di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup	5	3	2	2	1	0	13	Pembuatan kebijakan daerah untuk mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	LINGKUNGAN HIDUP	BADAN LINGKUNGAN HIDUP, DKP

	2. Adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Belum ada	Belum ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				
	3. Adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Ada	Ada	Ada	Ada				
	4. Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Pemantauan dan pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	LINGKUNGAN HIDUP	BADAN LINGKUNGAN HIDUP

	5. Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		2. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam		
	6. Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		3. Peningkatan Pengendalian Polusi		

	7. Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	10 usaha	5 usaha	6 usaha	7 usaha	8 usaha	9 usaha	10 usaha		4. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		BADAN LINGKUNGAN HIDUP, DKP
	8. Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	0%	0%	50%	100%	100%	100%	100%				
	9. Persentase pemantauan terhadap penanganan air limbah	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%				

	10. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	11. Persentase Industri yang memiliki AMDAL/izin lingkungan	0%	0%	50%	100%	100%	100%	100%				
	12. Persentase perumahan yang memiliki izin lingkungan	0%	0%	50%	100%	100%	100%	100%				
	13. Persentase kegiatan ekonomi yang memiliki dokumen lingkungan/izin lingkungan	0%	0%	50%	100%	100%	100%	100%				
	14. Jumlah monitoring pelaksanaan AMDAL setiap tahun	5	15	15	15	15	15	75				



	15. Persentase Peningkatan kualitas air, udara, tanah (%)	50%	75%	80%	90%	100%	100%	100%				
	16. Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan	3	10	15	20	25	30	30				
									1. Peningkatan sosialisasi kesadaran pelestarian lingkungan hidup			
									2. Penanganan pengaduan publik tentang pencemaran dan perusakan lingkungan			

	17. Persentase luasan ruang terbuka hijau	15,92%	15,98%	16%	16,01%	16,03%	16,05%	16,05%	1. Peningkatan penghijauan kota (Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH))	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)(Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH	LINGKUNGAN HIDUP	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	18. Jumlah ruas jalan ter hijaukan	59	119	169	219	269	319	319				
	19. Persentase kawasan ter hijaukan	15,92%	15,98%	16%	16,01%	16,03%	16,05%	16,05%				
	20. Persentase sampah terolah	30,18%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	Pengelolaan persampahan	Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Persampahan Sebagai Sumber Daya	LINGKUNGAN HIDUP	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	21. Rasio pasukan kuning per 100 KK	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,36		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	LINGKUNGAN HIDUP	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

22. Rasio gerobak pengangkut sampah per 100 KK	0,74	0,77	0,8	0,82	0,85	0,88	0,88				
23. Rasio kontainer di setiap TPS per 1000 KK	0,32	0,36	0,39	0,43	0,46	0,49	0,49				
24. Rasio tempat pembuangan sampah sementara per 1000 KK	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26				
25. Luasan TPA terbangun	30,5 Ha	30,5 Ha	35 Ha	40 Ha	45 Ha	50 Ha	50 Ha				
26. Persentase volume sampah yang tertangani	95,42%	96%	96%	96%	96%	96%	96%				
27. Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sampah	509	609	709	809	909	1009	1009				

	28. Persentase taman kota terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Peningkatan fasilitas sarana prasarana pertamanan dan dekorasi kota (Beautifikasi taman)	Peningkatan Sarana Prasarana Pertamanan	LINGKUNGAN HIDUP	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
	29. Persentase tersedianya sapenerangan jalan umum pada jalan kota	63,66%	65%	66,34%	67,88%	69,02%	70,36%	70,36%				
	30. Jumlah kerjasama dengan pihak lain dalam pemeliharaan taman kota	1	2	3	4	5	6	6				

	31. Persentase Penerangan Jalan Umum kota terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengelolaan PJU, PJL dan dekorasi kota	Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU), Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) dan dekorasi kota	LINGKUNGAN HIDUP	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Meningkatnya daya dukung tata ruang terhadap pembangunan	1. Persentase penurunan pelanggaran tata ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan meningkatkan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang	1. Perencanaan Tata Ruang	PENATAAN RUANG	BAPPEDA, DINAS PU - PPB

	2. Persentase Penanganan pengaduan terhadap pelanggaran lingkungan hidup dan tata ruang	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2. Pengoptimalan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang termasuk didalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang	2. Pemanfaatan Ruang		
										Pengendalian Pemanfaatan Ruang	PENATAAN RUANG	BAPPEDA, DINAS PU - PPB
	3. Adanya hasil inventarisasi tanah dan bangunan aset daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1. Inventarisasi lahan aset daerah	1. pembangunan sistem pendaftaran tanah	PERTANAHAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	4. Persentase lahan aset yang sudah bersertipikat	38%	40%	45%	50%	55%	60%	60%		2. Peningkatan Status Hukum Aset		

										3. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan			
	5. Persentase penyelesaian sengketa lahan aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2. Pengendalian pemanfaatan lahan aset daerah	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	PERTANAHAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	6. Persentase bidang lahan aset daerah penyumbang pendapatan asli daerah	51,13%	51,13%	51,13%	51,13%	51,13%	51,13%	51,13%	51,13%	3. Optimalisasi pemanfaatan lahan penunjang pembangunan daerah	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	PERTANAHAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	7. Jumlah pendapatan asli daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah	#####	##### #	##### ###	##### #	##### #	##### #	##### #####	##### ##				
<b>MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Malang sehingga Bisa Bersaing di Era Global</b>													

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KEGIATAN DAERAH (SESUAI PERMEND AGRI 13/2006)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014	2015	2016	2017					
Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan	Prosentase sekolah yang memiliki renstra sekolah (RKAS)	551 sekolah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Peningkatan mutu manajemen pendidikan	Manajemen Pelayanan Pendidikan	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Prosentase sekolah yang berhasil mengimplementasikan renstra sekolah (RKAS)	551 sekolah	100%	100%	100%	100%	100%	100%				



	<p>Prosentase kehadiran pengawas ke satuan pendidikan Intensitas kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan</p>	<p>75% (320/((36x(4 25/36))x x 100%</p>	85%	95%	100%	100%	100%	100%				
		<p>pengawas TK/SD : skn:3 blim:3 low:3 ked:2 klo:4</p>										
		<p>pengawas SMP/SMA : 15 pengawas SMK : 6)</p>										

	Persentase Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka:	100% (318 sekolah seluruhnya melaksanakan 18 jam per minggu)	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;	100% (318 sekolah seluruhnya melaksanakan 18 jam per minggu)	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	b) Kelas III : 24 jam per minggu;	100% (318 sekolah seluruhnya melaksanakan 18 jam per minggu)	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

	c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau	100% (318 sekolah seluruhnya melaksanakan 18 jam per minggu)	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu	100% (318 sekolah seluruhnya melaksanakan 18 jam per minggu)	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Persentase satuan pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku	100% 318 sekolah seluruhnya melaksanakan 18 jam per minggu	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

	Persentase Kepala sekolah yang melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100% 551 kepala sekolah seluruhnya melaksanakan supervisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
--	--	--	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--

<p>Persentase Kepala sekolah atau madrasah yang menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kota Malang atau Kantor Kementerian Agama Kota Malang pada setiap akhir semester</p>	<p>100% 551 kepala sekolah seluruhnya yang menyampaikan laporan</p>	<p>100% 551 kepala sekolah seluruhnya yang menyampaikan laporan</p>	<p>100% 551 kepala sekolah seluruhnya yang menyampaikan laporan</p>	<p>100% 551 kepala sekolah seluruhnya yang menyampaikan laporan</p>	<p>100% 551 kepala sekolah seluruhnya yang menyampaikan laporan</p>	<p>100% 551 kepala sekolah seluruhnya yang menyampaikan laporan</p>	<p>100% 551 kepala sekolah seluruhnya yang menyampaikan laporan</p>				
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

	Persentase satuan pendidikan dasar yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100% 318 sekolah seluruhnya menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100% 318 sekolah seluruhnya menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100% 318 sekolah seluruhnya menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100% 318 sekolah seluruhnya menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100% 318 sekolah seluruhnya menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100% 318 sekolah seluruhnya menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100% 318 sekolah seluruhnya menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)				
	Angka Kelulusan											
	- AL SD/MI	99,21%	99,21%	99,22%	99,23%	99,24%	99,25%	99,25%				
	- AL SMP/MTs	99,63%	99,63%	99,64%	99,66%	99,67%	99,68%	99,68%				
	- AL SMA/SMK/MA	99,08%	99,08%	99,31%	99,54%	99,77%	100%	100%				
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	105,50%	105,50%	106,74%	107,99%	109,24%	110%	110%				

	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	141,81%	141,81%	143,06 %	144,31%	145,56%	146,80%	146,80 %				
	Jumlah sekolah berpredikat Adiwiyata											
	- SD/MI	11	11	11	11	11	11	11				
	- SMP/MTS	6	6	6	6	6	6	6				
	- SMA/MA/SMK	8	8	8	8	8	8	8				
	Jumlah pameran karya siswa	2	2	2	2	2	2	10				
	Jumlah karya siswa yang terpublikasi secara lokal, regional, nasional dan internasional	2	2	2	2	2	2	10				
	Jumlah siswa yang memiliki karya inovatif	2	2	2	2	2	2	10				

	Jumlah siswa yang diberi <i>reward</i> atas karya inovatif mereka	2	2	2	2	2	2	10				
	Angka partisipasi murni											
	- APM SD/MI/Paket A	102,44	102,44	102,44	102,44	102,44	102,44	107,44				
	- APM SMP/MTS/Paket B	75,38	75,38	75,38	75,38	75,38	75,38	80,38				
	- APM SMA/MA/SMK/Paket C	81,88	81,88	81,88	81,88	81,88	81,88	86,88				
	Persentase SD/MI per jumlah total SD/MI											
	- Klojen	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08				
	- Kedungkandang	26,61	26,61	26,61	26,61	26,61	26,61	26,61				
	- Blimbing	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75				
	- Lowokwaru	20,56	20,56	20,56	20,56	20,56	20,56	20,56				
	- Sukun	21,77	21,77	21,77	21,77	21,77	21,77	21,77				



	Persentase SMP/MTs per jumlah total SMP/MTs											
	- Klojen	24,39	24,39	24,39	24,39	24,39	24,39	24,39				
	- Kedungkandang	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95				
	- Blimbing	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69				
	- Lowokwaru	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32				
	- Sukun	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63				
	Persentase SMA/MA/SMK per jumlah total SMA/MA/SMK											
	- Klojen	30	30	30	30	30	30	30				
	- Kedungkandang	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36				
	- Blimbing	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64				
	- Lowokwaru	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55				
	- Sukun	15,45	15,45	15,45	15,45	15,45	15,45	15,45				
	Angka Partisipasi Kasar (APK)											

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

	- APK SD/MI	114,78	114,78	114,78	114,78	114,78	120	120					
	- APK SMP/MTS	104,19	104,19	104,19	104,19	104,19	109	109					
	- APK SMA/MA/SMK	112,32	112,32	112,32	112,32	112,32	117	117					
	Angka melek huruf masyarakat	98,50%	98,50%	98,60 %	98,70%	98,80%	98,90%	98,90%					
	Angka Putus Sekolah (APS)												
	- APS SD/MI	0,05	0,05	0,04	0,03	0,01	0	0					
	- APS SMP/MTS	0,19	0,19	0,18	0,17	0,15	0,14	0,14					
	- APS SMA/SMK/MA	0,72	0,72	0,7	0,68	0,65	0,63	0,63					
	Persentase Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik	100% ( 319 Kasek SD sudah berkualifikasi S1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2. Peningkatan profesionalisme guru dan tenaga Kependidikan	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN

	<p>Persentase kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik</p>	<p>100% (123 Kasek SMP berkualifikasi S1)</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>					
	<p>Persentase pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik</p>	<p>100% ( 36 orang pengawas memiliki S1</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>					

	<p>Persentase guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik</p>	<p>100% ('11.625 guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>					
--	---	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

	<p>Persentase guru tetap yang bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan</p>	<p>100% ( 7856 guru tetap yang bekerja 37,5 jam per minggu</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>					
--	---	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

	Persentase guru yang mampu menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100% ( 11.625 guru yang mampu menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV perjenjang pendidikan	100% ( 319 Kasek SD sudah berkualifikasi S1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Jumlah guru yang dikirim untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas guru atau sejenisnya	5409	5409	5557	5705	5852	6000	6000				
	Rasio guru / murid per											

	kelas											
	- SD/MI	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63				
	- SMP/MTS	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2				
	- SMA/MA	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69				
	- SMK	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35				
	Persentase Ketersediaan 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan pada SD/MI	81,88	81,88	83,13	84,38	85,63	86,88	86,88				

Persentase Ketersediaan 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D-IV di SD/MI	70,31	70,31	71,56	72,81	74,06	75,31	75,31				
Persentase Ketersediaan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik pada setiap SD/MI	70,31	70,31	71,56	72,81	74,06	75,31	75,31				



	<p>Persentase Ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik pada setiap SMP/MTs</p>	91,53	91,53	92,78	94,03	95,28	96,53	96,53				
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

	Persentase Ketersediaan guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing dua orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris pada setiap SMP/MTs	27,97	27,97	29,22	30,47	31,72	32,97	32,97				
	Rasio guru / murid											
	- SD/MI	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33				
	- SMP/MTS	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23				
	- SMA/MA	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37				
	- SMK	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22				

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA MALANG TAHUN 2013 - 2018

	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah								3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	1. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	- SD/MI	1:1237	1:1237	1:1237	1:1237	1:1237	1:1237	1:1237		2. Pendidikan Menengah		
	- SMP/MTS	1:314	1:314	1:314	1:314	1:314	1:314	1:314		3. Pengembangan Politeknik		
	- SMA/MA/SMK	0,33125	0,325694	0,325694	0,325694	0,325694	0,325694	0,325694		Pendidikan Menengah		

<p>Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis</p>	48,75	50,63	51,8	52,97	54,15	55,32	55,32				
<p>Persentase SD/MI dengan Kondisi bangunan baik</p>	56,88	60,69	61,94	63,19	64,44	65,69	65,69				

	Persentase SMP/MTs dengan kondisi baik	69,11	69,11	70,36	71,61	72,86	74,11	74,11				
	Persentase SMA/MA/SMK dengan kondisi bangunan baik	55,56	56,36	57,61	58,86	60,11	61,36	61,36				
	Persentase Ketersediaan ruang lab IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik pada setiap SMP/MTs	74,8	75,61	76,96	78,3	79,65	81	81				

	Prosentase jumlah SMA/MA yang memiliki ruang lab Bahasa yang dilengkapi peralatan multimedia	50.84 (30 SMA memiliki lab bahasa /59 jumlah SMA)	50,85	52,54	54,24	55,93	57,63	59,32				
	Prosentase jumlah SMA/MA yang memiliki ruang lab IPA	40.67 (24 sekolah memiliki ruang lab/59 SMA)	40,68	44,07	47,46	50,85	54,24	57,63				
	Prosentase jumlah SMK yang memiliki ruang kerja praktek setiap jurusan	95,92	95,92	97,96	100	100	100	100				
	Persentase Ketersediaan satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru SD/MI	100% dari 318 sekolah	100% dari 318 sekolah	100% dari 318 sekolah	100% dari 318 sekolah	100% dari 318 sekolah	100% dari 318 sekolah	100% dari 318 sekolah				

Persentase Ketersediaan satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru SMP/MTS	81.3% ( 100 guru yang telah dilengkapi meja kursi dibanding 123 guru	81,3	86,18	91,06	95,12	100	100				
Persentase Ketersediaan ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru di setiap SMP/MTs	95,93	95,93	97,56	100	100	100	100				

	<p>Persentase Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik pada setiap SD/MI</p>	<p>71.39 (62.156 buku teks/87.065 peserta didik)</p>	<p>71,39</p>	<p>78,63</p>	<p>85,86</p>	<p>93,1</p>	<p>100</p>	<p>100</p>					
--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	------------	------------	--	--	--	--	--



	Persentase Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik pada setiap SMP/MTs	59.36 (23507 buku teks /39598 peserta didik)	59,36	67,45	75,53	83,61	91,69	100				
--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-----	--	--	--	--

	<p>Persentase Ketersediaan 1 (satu) set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA pada setiap SD/MI</p>	<p>36.25 (116 sat peraga IPA/320 SD)</p>	<p>36,25</p>	<p>43,75</p>	<p>50</p>	<p>59,375</p>	<p>65,625</p>	<p>75</p>				
	<p>Persentase sekolah memiliki fasilitas penunjang berupa kamar mandi siswa laki-laki dan perempuan</p>	<p>87.54 (464 sekolah dengan kamar mandi/530 seluruh sekolah)</p>	<p>87,55</p>	<p>88,68</p>	<p>89,81</p>	<p>90,94</p>	<p>92,08</p>	<p>93,58</p>				

	Persentase sekolah yang memiliki fasilitas olah raga yang layak	58.11 ('308 sekolah yg memiliki saraba olahraga/530 sekolah)	58,11	59,36	60,61	61,86	63,11	63,11				
	Persentase Ketersediaan sarana IT dalam penyelenggaraan pendidikan	81.13 (430 sekolah yang memiliki sarana IT/530 sekolah)	81,13	83,02	84,91	86,79	88,68	90,57				

	Persentase Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100% (530 sekolah seluruhnya memiliki jarak yang terjangkau	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Jumlah pengunjung perpustakaan keliling pertahun	8.160 Orang	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		4. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	PENDIDIKAN	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	Cakupan perpustakaan kelurahan	57 kel.102 perpustakaan	112 perpustakaan binaan	122 perpustakaan binaan	132 perpustakaan binaan	142 perpustakaan binaan	132 perpustakaan binaan	152 perpustakaan binaan				

	Jumlah pengunjung perpustakaan kota	240.045 orang	250.000 pengunjung	250.000 pengunjung	250.000 pengunjung	250.000 pengunjung	250.000 pengunjung	250.000 pengunjung				
	Jumlah judul buku di perpustakaan kota	141.794 eksemplar	4500 buku	5000 buku	5500 buku	6000 buku	7000 buku	169794 eksemplar				
	Adanya Fasilitas virtual library di perpustakaan kota	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket				
	Jumlah sarana kendaraan perpustakaan keliling	7 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	12 unit				
	Jumlah Taman Baca Masyarakat (TBM)	102	10	10	10	10	10	152				
	Jumlah lembaga PAUD setiap RW	2 ( 2 lembaga PAUD setiap RW)	2	2	2	3	3	3	5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini	Pendidikan Anak Usia Dini	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Jumlah peserta PAUD	19.132	19.132	19.182	19.232	19.282	19.332					

	Persentase peserta PAUD/ anak usia PAUD	37,89%	37,89%	39,14 %	40,39%	41,64%	42,89%	42,89%				
	Jumlah lembaga bimbingan belajar	202	202	203	204	205	206	206	6. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal	Pendidikan Non Formal	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Persentase LSM yang bergerak di bidang pendidikan non-formal	2	2	2	2	2	2	2				
	Jumlah lomba minat-bakat tingkat kota	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali				
	Jumlah partisipasi dalam lomba minat-bakat di tingkat Jawa Timur	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali				
	Jumlah partisipasi dalam lomba minat-bakat di tingkat nasional	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali				

	Jumlah prestasi dalam lomba minat-bakat di tingkat Jawa Timur	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali				
	Jumlah prestasi dalam lomba minat-bakat di tingkat Nasional	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali				
	Jumlah prestasi dalam lomba minat-bakat di tingkat internasional	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali				
Meningkatnya pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan dana pendidikan	Jumlah bantuan yang diberikan pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	31	31	32,55	33,53	34,53	35,57	36,64	2. Peningkatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus	Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan Non Formal	

	Rasio SLB/ jumlah ABK	1:53 ( 1 SLB terdapat 53 siswa ABK)	1:53	1:51	1:50	1:49	1:48	1:48				
	Rasio guru/jumlah ABK	1:20 ( 1 guru mengajar 20 siswa ABK)	19,57	18,32	17,07	15,82	14,57	14,57				
	Jumlah kerjasama dengan pihak lain dalam hal pemerataan akses pendidikan bagi keluarga miskin	1 kerjasama	1 kerjasa ma	1 kerjas ama	1 kerjasa ma	1 kerjasa ma	1 kerjasam a	1 kerjasa ma				(Pendidika n gratis bagi RTSM)
	Persentase siswa keluarga miskin yang memperoleh beasiswa dari pihak swasta	100% ( 7000 siswa)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4. Peningkat an fasilitas penunjang pendidikan bagi anak keluarga miskin			(Pendidika n gratis bagi RTSM)
	Rasio fasilitas kendaraan antar jemput sekolah/	2 kendaraan (untuk SMK 13)	5 kendara an	5 kendar aan	5 kendara an	5 kendara an	5 kendaraa n	5 kendar aan				(Pendidika n gratis bagi RTSM)
			0	1	2	1	1					



	jumlah siswa miskin							5				
	Persentase sekolah yang melakukan audit independen oleh KAP	0%	0%	5 sekolah	5 sekolah	5 sekolah	5 sekolah	20 sekolah				
	Persentase sekolah yang mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka	100% (530 sekolah)	100% (530 sekolah)	100% (530 sekolah)	100% (530 sekolah)	100% (530 sekolah)	100% (530 sekolah)	100% (530 sekolah)	2. Pembentukan layanan pengaduan penyalahgunaan dana pendidikan, disertai dengan mekanisme penanganan pengaduan yang cepat dan tepat			

	Adanya kebijakan sebagai pencegahan penyalahgunaan dana pendidikan	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	3. Pembuatan aturan-aturan sebagai cara antisipatif penyalahgunaan dana pendidikan			
	Persentase penanganan terhadap pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan biaya penyelenggaraan pendidikan	100% (seluruh penaduan tertangani)	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Meningkatnya semangat profesionalitas pemuda dan budaya prestasi di kalangan pemuda	Jumlah pelatihan pemberdayaan pemuda	3	3	5	6	6	6	26	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

	Jumlah Industri Olahraga	51	53	53	55	55	60	60				
	Jumlah fasilitasi pembinaan industri olahraga	0	1	0	1	1	0	3				
	Jumlah kegiatan kepemudaan	8	8	5	7	5	7	32				
	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)	240	240	232	234	235	236	240				
	Prosentase keaktifan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) aktif	22%	22%	25%	25%	30%	35%	40%	2. Fasilitasi kesempatan berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi	peningkatan peran serta kepemudaan	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi pemuda dan olahraga	1	1	1	1	1	2	6		peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan		

										hidup pemuda		
										upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba		
	Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Jawa Timur	25	4	5	5	5	6					
	Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Nasional	1	1	1	1	1	1	5				
	Jumlah even olahraga tingkat kota	4	4	5	4	5	4	22	1. Peningkatan penyelenggaraan event- event olahraga bagi pemuda	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

	Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat Jawa Timur	4	4	5	4	5	4	22		Pembinaan dan Pemasaran Olahraga		
	Jumlah partisipasi event olahraga di tingkat nasional	4	4	5	4	5	4	22				
	Jumlah prestasi olahraga di tingkat Jawa Timur	20	20	22	24	26	30	19	2. Pembinaan terhadap cabang-cabang olahraga daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Jumlah prestasi olahraga di tingkat Nasional	45	50	55	60	65	70	70				
	Jumlah organisasi olahraga prestasi yang dibina	37	39	39	42	45	50	50				

	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi olahraga prestasi	38	39	42	45	45	45	65				
	Jumlah fasilitasi pembinaan olahraga	0	0	1	1	1	1	4				
	Jumlah lapangan olahraga	20	20	22	23	24	24	24				
	Jumlah pembangunan lapangan olahraga	0	2	2	1	1	-	6				
	Persentase pemeliharaan lapangan olahraga	70%	22,70%	22,70 %	17,40%	37,50%	58,30%	70%				
	Jumlah kegiatan pembinaan atlet	0	-	1	1	1	1	4				
	Jumlah club olahraga	145	150	155	75	165	170	175				
	Jumlah cabang olahraga	42	42	44	47	50	65	65				

MISI 5 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Malang baik Fisik, maupun Mental untuk Menjadi Masyarakat yang Produktif												
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KEGIATAN DAERAH (SESUAI PERMEND AGRI 13/2006)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014	2015	2016	2017	2018				
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah kota	0	1	1	1	1	1	1	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/ prasarana kesehatan	pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	Persentase puskesmas yang memiliki fasilitas VCT, HCT dan IMS	13%	20%	27%	33%	40%	53%	53%		pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ruma		

										h sakit mata		
	Rasio Rumah Sakit terhadap penduduk (tiap 10.000 penduduk)	0,28	0,28	0,3	0,31	0,31	0,31	0,31		Standarisasi Pelayanan Kesehatan		
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (tiap 1000 penduduk)	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09		Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		
	Persentase	42%	58%	63%	67%	71%	75%	75%				



	rumah sakit yang telah terakreditasi	10 RS dari 24 RS	14 RS dari 24 RS	15 RS dari 24 RS	16 RS dari 24 RS	17 RS dari 24 RS	18 RS dari 24 RS	18 RS dari 24 RS				
	Rasio dokter puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)	0,09	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	2. Peningkatan kuantitas/kuualitas tenaga medis			
		1 dokter untuk 900 penduduk (74 dokter)	1 dokter untuk 600 penduduk (78 )	1 dokter untuk 600 penduduk (78 )	1 dokter untuk 600 penduduk (78 )	1 dokter untuk 600 penduduk (78 )	1 dokter untuk 600 penduduk (78 )	1 dokter untuk 600 penduduk (78 )				
	Rasio tenaga paramedis puskesmas terhadap penduduk (tiap 1.000 penduduk)	0,39	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39				
	Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	46,83	46,94	47,18	47,42	47,65	47,89	47,89				
	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	6,03	6,03	6,03	6,03	6,15	6,39	6,39				
	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	3,07	3,07	3,19	3,19	3,19	3,43	3,43				

	Rasio tenaga paramedis per 100.000 penduduk (bidan, perawat, tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, sanitasi, teknis medis, keterampilan psikiater)	30,03	30,03	30,03	30,15	30,15	30,15	30,15				
	Persentase persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan	Obat dan Perbekalan Kesehatan	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN

										Pengawasan Obat dan Makanan		
	Persentase peningkatan pengawasan sarana peredaran obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Pengembangan Obat Asli Indonesia		
	Persentase peningkatan pengawasan sarana peredaran kosmetik	60%	65%	70%	70%	75%	80%	80%		pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan		
Meningkatnya kesehatan ibu dan anak	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI	100%	3.625 balita	3.988 balita	4.387 balita	4.826 balita	5.309 balita	5.309 balita	3. Peningkatan keselamatan dan kesehatan ibu melahirkan, bayi, dan balita	Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		

	bulan											
	Rasio posyandu per satuan balita (1 : 80 balita)	1 : 103	1 : 80	1 : 80	1 : 80	1 : 80	1 : 80	1 : 80		promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera	DINAS KESEHATAN & BKBPM
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95%	95%	95%	96%	96%	97%	97%				
	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	70%	70%	80%	90%	95%	100%	100%				
	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	80%	82%	90%	91%	91%	91%	91%				

	Cakupan pelayanan Ibu Nifas	89%	89,50%	90%	90,50%	90,50%	91,00%	91%				
	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani.	54,89%	80%	80%	80%	80%	80%	80%				
	Cakupan kunjungan bayi.	68,29	90	90	90	90	90	90				
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	47,37%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Cakupan pelayanan anak balita.	54,03%	90%	90%	90%	90%	90%	90%				
	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Jumlah kader posyandu	5904	5712	5712	5904	5904	5904	5904				
	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

	kader posyandu aktif	(5904/5904)	(5712/5712)	(5712/5712)	(5904/5904)	(5904/5904)	(5904/5904)	(5904/5904)				
	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	81,75%	81,55%	81,55%	81,60%	81,65%	81,75%	81,75%				
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Persentase balita gizi buruk	100%	168 balita	165 balita	162 balita	159 balita	156 balita	810 balita	4. Peningkatan status gizi masyarakat	Perbaikan Gizi Masyarakat	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15	98,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

	tahun											
	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	3,90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Penemuan Pasien Baru TB-BTA positif	80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%				
	Penderita DBD yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Penemuan Penderita Diare	6,51	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	200 orang	250 orang	275 orang	302 orang	332 orang	365 orang	365 orang	1. Peningkatan promosi kesehatan	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN

	Jumlah LSM di bidang kesehatan masyarakat	0	0	0	0	332 orang	75%	75%	2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Pengembangan Lingkungan Sehat		
										Upaya Kesehatan Masyarakat		
										peningkatan pelayanan kesehatan lansia		
	Jumlah rujukan penderita HIV/AIDS di Puskesmas	0	3	4	5	6	8	26	1. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN



Jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi kesehatan dalam pelaksanaan bakti sosial kesehatan	0	1	1	1	1	1	1	1				
Jumlah masyarakat yang terlayani oleh bakti sosial perguruan tinggi	0	110 orang	110 orang	110 orang	110 orang	110 orang	110 orang	110 orang				
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	-	74%	75%	76%	77%	78%	78%	2. Pengembangan jaminan sosial pembiayaan kesehatan	Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	

	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	55,88%	74%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif sebesar 73,25% (PUS dibagi KB Aktif x 100%)	73.25%	75.85%	75.90 %	75.95%	75.97%	76%	76%	3. Pembinaan Kesehatan Keluarga melalui Program Keluarga Berencana	Keluarga Berencana	Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera	BKBPM
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2	2	2		penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga		

	Persentase akseptor KB	81%	82%	82%	82%	82%	82%	82%		Kesehatan Reproduksi Remaja		
	Cakupan peserta KB Aktif	73,25%	75,85%	75,90%	75,95%	75,97%	76%	76%		pelayanan kontrasepsi		
	Persentase peserta KB Aktif	81%	82%	82%	82%	82%	82%	82%		pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		
	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Kel. Sejahtera I	55454	49908	44917	40425	36783	32745	32745		Program Pemberdayaan kehidupan berkeluarga bagi remaja		
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya usia di bawah 20 tahun 3,5 % pada 2014	1,02%	3,5	0,83%	0,75%	0,67%	0,59%	0,59%				

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif 65 % pada 2014	75,74%	65,00%	75,90 %	75,95%	75,97%	76,00%					
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5 % pada 2014	13,24%	5,00%	11,25 %	10,50%	9,50%	8,50%	8,50%				
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 70 % pada 2014	70,00%	70,00%	70,50 %	70,60%	70,70%	70,80%	70,80%				
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87% pada 2014	81,93%	87,00%	87,10 %	87,15%	87,20%	87,25%	87,25%				

Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Pe nyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua ) Kelurahan	1:02	1:02	1:02	1:02	1:02	1:02	1:02	1:02				
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBL) 1 Petugas di setiap Kelurahan	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01	1:01				
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%				

	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan 100% setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Jumlah penyandang penyakit reproduksi remaja											
	Jumlah sosialisasi KIE	33180 kali	33181 kali	33182 kali	33183 kali	33184 kali	33185 kali	33186 kali				
		(5 layanan x 553 RW x 12 bulan)	(5 layanan x 553 RW x 12 bulan)	(5 layanan x 553 RW x 12 bulan)	(5 layanan x 553 RW x 12 bulan)	(5 layanan x 553 RW x 12 bulan)	(5 layanan x 553 RW x 12 bulan)	(5 layanan x 553 RW x 12 bulan)	(5 layanan x 553 RW x 12 bulan)			
	Persentase Ketersediaan alat kontrasepsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		(16.169/16.169)	(26.169/26.169)	(36.169/36.169)	(46.169/46.169)	(56.169/56.169)	(66.169/66.169)	(66.169/66.169)				
	Jumlah dan jenis layanan KB	6	6	6	6	6	6	6				
	Jumlah pria ikut KB	288	298	310	315	320	325	325				

	Jumlah Petugas Penyuluh KB Lapangan (PPKBL)											
	Adanya Pengkatagorian Petugas Penyuluh KB Lapangan (PPKBL)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				
	Jumlah Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama aktif mendukung program KB	1106	1106	1106	1106	1106	1106	1106				
<b>MISI 6 : Membangun Kota Malang sebagai Kota Tujuan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Berbudaya</b>												
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KEGIATAN DAERAH (SESUAI PERMEND AGRI 13/2006)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014	2015	2016	2017					

Meningkatnya kelestarian seni budaya dan kearifan lokal, yang antara lain ditujukan guna meningkatkan daya tarik wisata.	Adanya hasil pemetaan tentang khazanah seni budaya khas Kota Malang	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	1. Inventarisasi aset budaya tradisional Kota Malang, terutama yang dapat dikembangkan sebagai potensi wisata	Pengelolaan Kekayaan Budaya	KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
										Pengelolaan Keragaman Budaya		
	Jumlah kelompok kebudayaan yang masih aktif	-	90%	80%	100%	100%	100%	100%	2. Inventarisasi dan pembinaan kelompok-kelompok budaya di Kota Malang	Pengembangan Kemitraan	KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



	Jumlah pembinaan terhadap kelompok-kelompok kebudayaan	224	249	274	299	324	349	349		pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya		
	Jumlah penghargaan yang diterima oleh budayawan/seniman, baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional	4	5	6	7	8	9	9	3. Peningkatan dukungan dan apresiasi terhadap aktivitas kebudayaan oleh budayawan/seniman dan masyarakat	Pengembangan Nilai Budaya	KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Jumlah event pariwisata/budaya yang diadakan oleh budayawan dan masyarakat	1	2	3	4	5	6	6	1. Fasilitasi dan intensifikasi promosi wisata berbasis seni budaya	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	Jumlah media promosi wisata budaya Kota Malang	5 KORAN LOKAL 10 TV LOKAL	6 KORAN LOKAL 11 TV LOKAL	7 KORAN LOKAL 12 TV LOKAL	8 KORAN LOKAL 13 TV LOKAL	9 KORAN LOKAL 14 TV LOKAL	10 KORAN LOKAL 15 TV LOKAL	10 KORAN LOKAL 15 TV LOKAL				
	Jumlah keikutsertaan budayawan dalam event-event wisata	3	4	5	6	7	8	8				
	Jumlah event promosi wisata budaya	6	7	8	9	10	11	11				
	Jumlah kerjasama dengan pihak lain untuk mempromosikan pariwisata kebudayaan kota Malang	3	4	5	6	7	8	8				
	Jumlah penggunaan Gedung Kesenian untuk kegiatan seni budaya	20	21	22	23	24	25	25				
	Cakupan kajian seni 50% pada	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%				

	2014											
	Cakupan fasilitasi seni	143	143	143	143	143	143	143				
	Cakupan gelar seni	133	133	133	133	133	133	133				
	Cakupan misi kesenian	100	100	100	100	100	100	100				
	Cakupan SDM kesenian	250	250	250	250	250	250	250				
	Cakupan tempat kesenian	100	100	100	100	100	100	100				
	Cakupan organisasi kesenian	196	196	196	196	196	196	196				
Meningkatnya ragam dan kualitas obyek wisata alam dan buatan	Rata-rata persentase tingkat okupansi hotel	49%	52.5%	55%	57.5%	60%	62.5%	62.5%	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata (Danau Kota)		PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Jumlah restoran/ rumah makan	191	196	201	206	211	216	216				

	Jumlah Objek cagar budaya	212	214	216	218	220	222	222				
	Persentase objek Cagar Budaya yang terawat	40%	44%	48%	52%	57%	62%	62%				
	Persentase penanganan terhadap pelanggaran Konservasi Cagar Budaya	80%	80%	90%	100%	100%	100%	100%				
	Jumlah obyek wisata aset daerah yang direvitalisasi	1	0	0	0	0	0	0				
	Jumlah penyedia jasa transportasi wisata	113	123	128	133	138	143	143				
	Adanya Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPDA)	1	1	0	0	0	0	1				
	Jumlah pusat informasi wisata	4	5	6	7	8	9	9				
	Jumlah media promosi	8	8	8	8	8	8	8				

	wisata											
	Adanya kalender wisata kreatif berbasis kegiatan masyarakat	10	15	20	25	35	45	45				
	Persentase Jumlah taman kota dan hutan kota sebagai lokasi rekreasi murah masyarakat	11	0	13	14	15	16	16	1. Pembuatan lokasi wisata rekreasi warga di taman dan hutan kota			
	Rasio lokasi rekreasi murah per 100.000 penduduk	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8				
	Jumlah kerjasama dengan pihak lain untuk merevitalisasi taman dan hutan kota menjadi lokasi rekreasi murah	1	0	2	3	4	5	5	2. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak untuk membuat wisata taman kota, hutan kota			

	Jumlah kerjasama dengan pihak lain untuk mempromosikan lokasi wisata murah masyarakat	0	0	2	3	4	5	5	Penyediaan Kereta Gantung Wisata dan Angkutan Wisata Kota			
	Jumlah kegiatan masyarakat yang menunjang pariwisata	10	15	20	25	30	35	35	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan kreatif yang mendukung pengembangan wisata			
	Jumlah kelompok/komunitas sadar wisata	0	5	8	10	12	15	15				
<b>MISI 7 : Mendorong Pelaku Ekonomi Sektor Informal dan UKM agar Lebih Produktif dan Kompetitif</b>												

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KEGIATAN DAERAH (SESUAI PERMEND AGRI 13/2006)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014	2015	2016	2017					
Meningkatnya produktivitas dan daya saing pelaku usaha kecil menengah	Jumlah kebijakan daerah yang melindungi perkembangan UKM	612	723	856	978	1.112	1.232	1.232	1. Pembuatan kebijakan daerah yang mendorong tumbuh kembangnya UKM	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI DAN UKM
	Jumlah UKM	10.611	10.723	12.567	15.465	16.432	18.504	18.504				
	Jumlah asosiasi pengusaha UKM	1	1	6	6	6	6	6				
	Persentase wirausaha baru yang aktif	210	240	278	368	465	597	597				
	Adanya database dan profil UKM di Kota Malang	1	1	1	1	1	1	1				

	Jumlah perizinan usaha UKM	548	559	597	680	731	821	821				
	Jumlah kerjasama UKM dengan pasar modern	0	20	40	60	80	100	100				
	Persentase penyerapan produk unggulan UKM di pasar modern (minimarket dan supermarket)	0	15	35	80	90	123	123				
	Jumlah tenaga kerja UKM	43.234	44.458	45.323	46.379	47.560	48.902	48.902				
	Jumlah promosi pameran daerah yang diikuti UKM per tahun	6	8	12	15	18	22	75				
	jumlah pusat konsultasi bisnis	1	1	1	1	1	1	5				



	Terselenggara nya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UKM tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi	0	1	1	1	1	1	5				
	Prosentase (%) penurunan angka kemiskinan											
	Cakupan masyarakat/ kelompok masyarakat miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan	1,09%	0,88%	1,18%	1,47%	1,77%	2,01%	2,01 %	2. Pembinaan kapasitas kelembagaan UKM	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI DAN UKM

	Cakupan masyarakat/keompok masyarakat miskin yang mendapat bantuan sarana dan prasarana usaha	136	153	176	198	232	272	272				
	Cakupan masyarakat/keompok masyarakat miskin yang terfasilitasi dalam memperoleh modal usaha	34,99%	38,25%	39,73%	41,20%	42,67%	44,14%	44,14%				
	Jumlah perputaran modal UKM	30 milyar	31 milyar	32 milyar	33 milyar	34 milyar	35 milyar	165 milyar	3. Pembinaan manajemen keuangan UKM	Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI DAN UKM
	Jumlah Nilai transaksi dalam tiap promosi UKM	15 jt	20 jt	25 jt	30 jt	35 jt	40 jt	150 jt				

Jumlah pelatihan manajemen keuangan bagi pelaku UKM	-	-	75	75	100	150	150				
Cakupan pelaku UKM yang mengikuti pelatihan manajemen keuangan	1%	2%	5%	7%	9%	12%	35%				
Jumlah Besaran kredit yang disalurkan pada sektor UKM	316 milyar	350 milyar	370 milyar	390 milyar	435 milyar	650 milyar	2.195 milyar				
Persentase Tingkat pengembalian kredit UKM	80%	82%	85%	100%	100%	100%	100%				
Jumlah kelompok pelaku ekonomi produktif	149	149	149	149	149	149	149				

	Jumlah kegiatan pelatihan keterampilan kepada pelaku ekonomi produktif	1	2	5	7	9	10	34				
	Jumlah pelaku ekonomi produktif penerima akses permodalan	75	150	175	200	225	250	250				
Meningkatnya produktivitas dan daya saing pelaku usaha mikro	Adanya hasil pemetaan mengenai jumlah dan titik sebaran PKL sebelum dilakukan penertiban	0	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	1. Inventarisasi jumlah dan sebaran PKL serta Peningkatan bantuan kredit permodalan melalui fasilitasi hubungan dengan kalangan perbankan	Penataan dan Pemberdayaan PKL	PERDAGANGAN	DINAS PASAR

Jumlah PKL yang mendapatkan KUR	0	50	50	50	50	50	50	250				
Jumlah Besar kredit yang dikururkan oleh kalangan perbankan kepada PKL	0	0	0	0	0	0	0	0				
Persentase Tingkat pengembalian kredit PKL	0	0	0	0	0	0	0	0				
Jumlah kawasan khusus PKL	1	1	1	1	1	1	1	5	2. Pembangunan sentra-sentra PKL yang layak, yang terintegrasi dengan kawasan pengembangan kota	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	PERDAGANGAN	DINAS PASAR

									1. Pembuatan kebijakan daerah yang melindungi keberadaan pasar tradisional			
	Adanya kebijakan daerah yang melindungi keberadaan pasar tradisional	1	1	1	1	1	1	5	1. Pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memberdayakan pedagang pasar tradisional	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	PERDAGANGAN	DINAS PASAR, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN & BAGIAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL - SETDA

	Cakupan pedagang tradisional yang menerima manfaat dari program pemberdayaan	6000	6000	6500	6500	6500	6500	6500				
	Jumlah kerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan pemberdayaan pedagang pasar tradisional	3	3	3	3	3	3	3				
	Jumlah infrastruktur pasar tradisional yang direhabilitasi melalui kerjasama dengan pihak lain	3	3	3	3	3	3	3				
	Jumlah pasar tradisional	28	28	28	28	28	28	28	3. Penataan pasar tradisional kecamatan	Pengembangan dan Peningkatan	PERDAGANGAN	DINAS PASAR & DINAS PERINDUSTRI

									(Penataan Pasar Burung dan Pasar Bunga)	Pelayanan Pasar		RI-AN DAN PERDAGAN GAN
	Jumlah paguyuban pedagang pasar tradisional	28	28	28	28	28	28	28		Peningkata n Efisiensi Perdaganga n Dalam Negri		
	Persentase infrastruktur bangunan pasar tradisional yang direhabilitasi	32%	18%	18%	21%	21%	21%	100%				
Meningka tkan Kualitas dan Kuantitas Koperasi di Kota Malang	Persentase KSP / USP sehat	327	352	378	423	457	475	475	1. Pembinaan pengelolaan dan keuangan koperasi	Peningkata n Kualitas Kelembaga an Koperasi	KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI DAN UKM



Persentase koperasi berkategori sehat / baik / yang sudah menerapkan sistem pencatatan sesuai Standart Akuntansi Indonesia	14%	17%	19%	20%	21%	23%	100%				
Jumlah koperasi berprestasi	2	2	2	2	2	2	10				
Persentase permasalahan perkoperasian yang tertangani	60%	63%	65%	100%	100%	100%	100%				

Meningkatnya daya saing produk pangan daerah	Jumlah Nilai produksi hasil pertanian (ton)	16243	16649	17065	17492	17929	18377	18377	1. Peningkatan produksi potensi unggulan daerah di bidang pertanian/ perkebunan, peternakan, dan perindustrian	Peningkatan Kesejahteraan Petani	PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
	Jumlah Nilai produksi hasil perkebunan	113449	116285	119192	122172	125226	128357	128357		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan		
	Jumlah Nilai produksi hasil peternakan	759952	778951	798425	818386	838846	859817	859817		Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan		

	Jumlah nilai produksi hasil perikanan	40519	41532	42570	43634	44725	45843	45843		Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan		
										Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		
										Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		
										Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		
										peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan		

										peningkatan produksi hasil peternakan		
										Rehabilitasi Hutan dan Lahan		
										Pengembangan Budidaya Perikanan	KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERTANIAN
										Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		
Meningkatnya produk pangan lokal sebagai pendukung ketahanan pangan daerah	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita 90% pada 2015	57,44%	75%	80%	90%	95%	100%	100%	Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan daerah	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	KETAHANAN PANGAN	KANTOR KETAHANAN PANGAN

	Penguatan Cadangan Pangan 60% pada 2015	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%				
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	60%	75%	90%	95%	95%	100%	100%				
	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	60%	80%	90%	90%	95%	95%	95%				
	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	60%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	Peningkatan penganekearagaman produksi pangan	Peningkatan penganekearagaman produksi pangan	KETAHANAN PANGAN	KANTOR KETAHANAN PANGAN
	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	50%	60%	80%	80%	85%	85%	85%	Peningkatan distribusi bahan pangan	Peningkatan distribusi bahan pangan	KETAHANAN PANGAN	KANTOR KETAHANAN PANGAN
	Penanganan Daerah Rawan Pangan	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%				
<b>MISI 8 : Mendorong Produktivitas Industri dan Ekonomi Skala Besar yang Berdaya Saing, Etis dan Berwawasan Lingkungan</b>												

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KEGIATAN DAERAH (SESUAI PERMEND AGRI 13/2006)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014	2015	2016	2017					
Meningkatnya nilai investasi untuk pengembangan industri berskala besar	1. Adanya kebijakan daerah yang mendukung masuknya investasi baru	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1. Peningkatan kebijakan daerah yang mendukung investasi	1. Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi	PENANAMAN MODAL	BAGIAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL - SETDA
	2. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	0	0	0	1	2	2	5		2. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah		
	3. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama		

	unggulan									Investasi		
	4. Terselenggaranya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	6 MOU		2	2	2	6					
	5. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal	9 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	9 kegiatan				
	6. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	0	0	1	1	1	1	4				

	7. Jumlah investor baru skala nasional	9	10	11	12	13	14	14				
										1. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
										2. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri	1. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0%	30%	45%	75%	75%	75%	75%	2. Peningkatan kualitas tenaga kerja	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	KETENAGAKERJAAN	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI



	2. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	71%	75%	78%	80%	80%	80%	80%				
	3. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0%	32%	48%	60%	60%	60%	60%				
	4. Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	341 orang	375 orang	413 orang	454 orang	499 orang	549 orang	549 orang	3. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Peningkatan Kesempatan Kerja	KETENAGAKERJAN	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	5. Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	28%	50%	60%	70%	70%	70%	70%		Transmigrasi Regional	KETRANSMIGRASI	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	6. Jumlah lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal	1.035 perusahaan	1.035 perusahaan	1.035 perusahaan	1.035 perusahaan	1.045 perusahaan	1.050 perusahaan	1.050 perusahaan				

	7. Angka partisipasi angkatan kerja	12,79%	15%	20%	25%	35%	40%	40%				
	8. Jumlah pengangguran terbuka	7.145	7.073	6.967	6.863	6726	6591	6591				
	9. Rasio daya serap tenaga kerja	64,81	0,6	0,65	0,7	0,75	0,75	0,75				
	10. Jumlah Pelayanan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	48.385 orang	50.804 orang	50.804 orang	53.344 orang	56.012 orang	58.812 orang	58.812 orang				
	11. Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	48.385 orang	55.093 orang	61798 orang	68506 orang	75214 orang	81922 orang	88630 orang				
	12. Upah Minimum Kota (UMK)	18%	20%	20%	20%	20%	25%	25%				

	13. Jumlah pelayanan yang menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	707	810	920	1100	1225	1350	1350				
	14. Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	77%	80%	82%	82%	85%	85%	85%	3. Peningkatan fasilitasi konflik hubungan industrial	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	KETENAGAKERJAAN	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	15. Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	65%	85%	89%	90%	90%	90%	90%				
	16. Jumlah kasus Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	35 kasus	35 kasus	31 kasus	29 kasus	27 kasus	25 kasus	25 kasus				

	17. Persentase Pemeriksaan Perusahaan	68%	70%	75%	80%	85%	85%	85%				
	18. Persentase Pengujian Peralatan di Perusahaan	27%	30%	35%	40%	45%	50%	50%				
Terintegrasinya sentra industri kecil menengah	1. Jumlah kerjasama alih TTG dengan perguruan tinggi	2 kerja sama	8 kerja sama	8 kerja sama	8 kerja sama	8 kerja sama	8 kerja sama	8 kerja sama	4. Optimalisasi alih Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengolahan produk unggulan	1. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2. Jumlah IKM penerima alih TTG	120	300 IKM	300 IKM	300 IKM	300 IKM	300 IKM	300 IKM		2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		
	3. Cakupan IKM penerima hibah sarana produksi	10%	20%	40%	60%	80%	100%					

	5. Persentase kerjasama produksi antar IKM yang telah dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%		5. Pengembangan kawasan industri kecil menengah terpadu	1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	6. Persentase IKM yang mengembangkan kerjasama produksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%			2. Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial		
										3. Penataan Struktur Industri		
<b>MISI 9 : Mengembangkan Sistem Transportasi Terpadu dan Infrastruktur Yang Nyaman Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat</b>												
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KEGIATAN DAERAH (SESUAI PERMEND AGRI 13/2006)	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2013	2014	2015	2016	2017					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	-2018				

Meningkatnya fungsi sarana transportasi	1. Jumlah titik rawan macet	33	28	23	16	9	1	1	1. Penanganan persoalan kemacetan di berbagai ruas jalan (one way/ jalan satu arah, contra flow)	1. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
	2. Persentase titik rawan macet yang berhasil diurai	15,15%	15%	21%	21%	21%	24%	24%		2. Peningkatan dan pengamanan lalu lintas		
	3. Persentase ketersediaan SDM di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL), Evaluasi Andal Lalin, Pengelolaan Parkir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		

	4. Persentase ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	5. Adanya tempat pengujian kendaraan bermotor	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		7. Peningkatan pengendalian pemanfaatan sarana transportasi dan perhubungan (Penyediaan pusat parkir).	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN

	6. Cakupan kendaraan wajib uji kir yang terlayani	73,79%								2. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		
	7. Persentase tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor per 4.000 kendaraan wajib uji	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	8. Rasio infrastruktur perlengkapan jalan	0,49	0,6	0,7	0,75	0,8	0,85	0,85		3. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		
	9. Persentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail)	49,28%	60%	70%	75%	80%	85%	85%				



	10. Jumlah titik parkir di tepi jalan umum	412	432	452	472	492	512	512				
	11. Jumlah penertiban parkir di tepi jalan umum	412	432	452	472	492	512	512				
	12. Persentase halte dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	13. Persentase ketersediaan halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	86,11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	14. Persentase ketersediaan terminal yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	15. Jumlah penertiban terminal bayangan	11	11	11	11	11	11	55				

	16. Persentase Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota	94,96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	17. Jumlah penertiban angkutan umum tanpa ijin trayek	48	48	48	48	48	48	160	8. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan dan pelaksanaan sistem transportasi dan memperkuat koordinasi antar sektor dan pihak terkait	Peningkatan Pelayanan Angkutan	PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN

	18. Persentase ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan 75% untuk 2014	62,36%	75%	80%	85%	90%	100%	100%				
	19. Jumlah izin trayek angkutan	1808 izin	1808 izin	1808 izin	1808 izin	1808 izin	1808 izin	1808 izin				
	20. Jumlah organisasi/ paguyuban angkutan darat	2	2	2	2	2	2	2				
	21. Jumlah rekomendasi Forum Lalu Lintas untuk penyelesaian persoalan lalu lintas	6 Rekom	6 Rekom	6 Rekom	6 Rekom	6 Rekom	10 Rekom	34 Rekom				
Meningkatnya daya dukung sistem transportasi dan sarana	1. Jumlah peralatan perawatan jalan yang cukup	1	1	2	2	3	4	4	1. Peningkatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan	1. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	PEKERJAA N UMUM	DINAS PU - PPB

perhubungan untuk menunjang mobilitas masyarakat									n sarana bina marga	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		
										3. Pembangunan Jalan dan Jembatan		
										4. inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan		
										5. tanggap darurat Jalan dan Jembatan		
	2. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,27	0,35	0,45	0,55	0,75	1,5	1,5		6. Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan		DINAS PU - PPB, DKP
	3. Persentase kondisi jalan yang baik	90,59%	92%	95%	97%	100%	100%	100%				
	4. Persentase jembatan	48%	49%	50%	52%	53%	55%	55%				

	standar (lebar minimal 6 meter) yang dilalui kendaraan Roda 4											
	5. Jumlah pembangunan jalan dan jembatan baru								Pembangunan Underpass, overpass, lingkaran dalam, lingkaran timur, lingkaran barat			
	- jalan	0	0	1	0	0	0	1				
	- jembatan	1	1	0	1	0	0	2				
	6. Jumlah pembangunan pedestrian yang ramah terhadap pejalan kaki dan penyandang cacat	9	4	5	5	4	5	23				

Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur pemukiman dan drainase	1. Adanya peta wilayah kawasan kumuh	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	2. Penyediaan infrastruktur dasar di wilayah miskin	Pembangunan infrastruktur kelurahan	PERUMAHAN	DINAS PU - PPB, KELURAHAN
	2. Persentase penurunan kawasan kumuh	16%	15%	14%	13%	12%	11%	11%	3. Peningkatan ketersediaan infrastruktur pemukiman rakyat yang layak  (Penyediaan Rumah Susun Terpadu)	1. Lingkungan Sehat Perumahan	PERUMAHAN	DINAS PU - PPB, DKP

3. Persentase wilayah kawasan kumuh yang tidak terjangkau sarana air bersih	16%	15%	14%	13%	12%	11%	11%			2. Penyediaan dan pengolahan air baku	PERUMAHAN	DINAS PU - PPB
4. Jumlah wilayah kawasan kumuh yang tidak bersanitasi	16%	15%	14%	13%	12%	11%	11%			3. Pemberdayaan komunitas Perumahan	PERUMAHAN	DINAS PU - PPB
5. Rata-rata prosentase rumah tinggal bersanitasi di wilayah kumuh	84%	85%	86%	87%	88%	89%	89%					
6. Prosentase rumah layak huni di wilayah kumuh	84%	85%	86%	87%	88%	89%	89%					
7. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih di wilayah kumuh	84%	85%	86%	87%	88%	89%	89%			4. Pengembangan kinerja pengelola air minum dan	PERUMAHAN	DINAS PU - PPB, DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

										air limbah		
	8. Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	200	329	200	200	300	300	1329				
	9. Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih	116.857	128.543	141.397	155.537	171.090	188.199	188.199				
	10. Jumlah Rumah tangga pengguna listrik	278.471	281.256	284.068	286.909	289.778	292.676	292.676				
	11. Jumlah Rumah tangga ber-Sanitasi sehat	85%	85%	86%	87%	88%	89%	89%				
	12. Prosentase rumah layak huni	84%	84%	85%	86%	87%	88%	88%		5. Pengembangan Perumahan	PERUMAHAN	DINAS PU - PPB



	13. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	200 Unit	100 Unit	0	100 Unit	0	100 Unit	300 unit		6. Pembangunan dan Pemeliharaan Rusunawa dan Rusunami		
	14. Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	96%	96%	97%	98%	99%	100%	100%				
	15. Cakupan gedung daerah/Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial yang memenuhi standar	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%		7. Pembangunan/Perbaikan Gedung Daerah dan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial		
	16. Prosentase rumah tinggal (RT) layak huni yang menggunakan air bersih	16%	16%	17%	18%	19%	20%	20%				

	17. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota 25% pada 2015	80%	80%	80%	82%	83%	84%	84%		1. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	PERUMAHAN	DINAS PU - PPB
	18. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%		2. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial		
	19. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK	85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%				
	20. Luasan PSU yang dibangun pihak ke-tiga	10%	11%	12%	13%	14%	15%	0,15		3. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		

	21. Rasio Luasan PSU yang diserahkan ke pemkot dibanding luasan PSU yang ada	10%	11%	12%	13%	14%	15%	0,15				
	22. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU)	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%		1. Penyediaan PSU untuk kawasan permukiman		
										2. Penyediaan PSU Perumahan Formal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)		
	23. Panjang drainase baru yang dibangun	19.9 km	20 km	20 km	20 km	20 km	20 km	100 km	4. Peningkatan ketersediaan infrastruktur drainase	1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	PEKERJAA N UMUM	DINAS PU - PPB

	24. Persentase pemeliharaan drainase	13%	13%	14%	15%	16%	17%	17%		2. Rehabilitasi /pemeliharaan talud/bronjong		
										3. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong		
										4. Tanggap darurat plengsengan dan saluran air		
										5. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		

										6. Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya		
	25. Jumlah ketersediaan sistem jaringan drainase dan sumur resapan skala kawasan dan skala kota, sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	3 Jaringan	3 Jaringan	2 Jaringan	2 Jaringan	1 Jaringan	0 Jaringan			7. Pengendalian banjir (Perda Penataan Bangunan)		

26. Jumlah Tempat Pemakaman Umum	9 TPU	9	10	10	10	11	11	Pengelolaan TPU	Pengelolaan Areal Pemakaman	PERUMAHAN	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
27. Luas lahan Tempat Pemakaman Umum	447,396 m <sup>2</sup>	447.396 m <sup>2</sup>	456.996 m <sup>2</sup>	456.996 m <sup>2</sup>	456.996 m <sup>2</sup>	466.596 m <sup>2</sup>	466.596 m <sup>2</sup>				
28. Rasio luas lahan Tempat Pemakaman Umum / 1.000 orang	529,04 m <sup>2</sup> /1.000 orang	487,14 m <sup>2</sup> /1.000 orang	458,19 m <sup>2</sup> /1.000 orang	421,91 m <sup>2</sup> /1.000 orang	388,50 m <sup>2</sup> /1.000 orang	365,25 m <sup>2</sup> /1.000 orang	365,25 m <sup>2</sup> /1.000 orang				







